

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2012. *“Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom”*. Bandung: Refika Aditama.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *“Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah dan Masa Kini”*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basah, Sjachran. 1992. *“Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi”*. Bandung: Alumni. Cet. II
- Cartigny, G.J.M. dan F.H. Van der Burg. 1994. *“Perijinan Yang Melawan Hukum Di dalam Buku Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”*. Jakarta.
- Effendi, Lutfi, S.H., M.HUM. 2004. *“Pokok-Pokok Hukum Administrasi”*. Malang: Bayumedia Publising.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *“Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatige Bestuur)”*. Surabaya: Yuridika. Cet. I
- 1994. *“Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia”*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- 1991. *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara”*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cet. II
- Indroharto. 1994. *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2003. *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*. Jakarta: Buku II Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S.F. 2001. *“Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara”*. Yogyakarta: UII Press.
- 2003. *“Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia”*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Prenada Media.
- Muthahhari, Murthadha. 1992. *“Keadilan Ilahi”*. Bandung: Mizan

- Setiadi, Wicipto. 2001. “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” Suatu Perbandingan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sibuea, Hotma P. 2010. “*ASAS NEGARA HUKUM, Peraturan Kebijakan: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, Jakarta: Erlangga.
- Syamsudin, M. 2007. “*Operasional Penelitian Hukum*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W Riawan. 2005. “*Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*”. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Wiyono, R. 2008. “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. I
- , 2010. “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160);
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bagian kedua tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 8);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Keputusan Bupati Sleman Nomor: 462/Kep.KHD/A/2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Masa Jabatan 2013-2019.

Sumber Hukum Lain:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:
03/G/2014/PTUN.YK